

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan. UMKM mempunyai kontribusi penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di Indonesia. UMKM berperan penting dalam mendorong proses pembangunan serta pertumbuhan ekonomi baik di negara berkembang maupun negara maju. UMKM di Indonesia memiliki peran mempercepat pemulihan ekonomi pasca krisis moneter, menyediakan alternatif lapangan pekerjaan, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat masyarakat. Selain itu, UMKM turut berkontribusi dalam menciptakan pemerataan pendapatan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjaga stabilitas negara (Fitri, Jacinda, Kamaliatun, & Nur, 2025). UMKM berkontribusi dalam penyediaan produk dan layanan, penyediaan peluang kerja dan pemerataan pendapatan yang lebih baik dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2024 jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM tersebut tersebar di berbagai sektor seperti kuliner, fashion, kerajinan tangan, hingga teknologi digital (Dwitri, 2024). Meningkatnya jumlah pelaku UMKM membuat tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Selain itu, UMKM berperan dalam memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat domestik maupun internasional, membuka pasar baru, serta peran dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan neraca pembayaran. UMKM berperan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan perusahaan (Yulya, Putri, Aldi, & Fahrur, 2024). Kenaikan jumlah pelaku UMKM hampir merata di wilayah Indonesia

salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta yang merupakan provinsi yang di kenal sebagai kota pelajar dan wisata, menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat baik warga asli Yogyakarta maupun masyarakat dari luar wilayah Yogyakarta ingin mencoba mendirikan usaha di Yogyakarta. Berikut data jumlah pelaku UMKM di Yogyakarta berdasarkan skala usahanya

Tabel 1. 1 Data Pelaku UMKM di Yogyakarta Berdasarkan Skala Usaha

Skala	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Usaha Mikro	318.892	324.745	324.408	327.774
Usaha Kecil	16.061	16.069	16.069	16.076
Usaha Menengah	2.107	2.110	2.109	2.130
Jumlah	337.060	342.924	342.586	345.980

Sumber : Bapperida Jogja

Berdasarkan tabel 1.1 menyatakan bahwa rata-rata jumlah pelaku UMKM di Yogyakarta terus meningkat. Berdasarkan rekapitulasi Bapperida Jogja jumlah UMKM tercatat sebanyak 337.060 di tahun 2021, sebanyak 342.924 di tahun 2022, sebanyak 342.586 di tahun 2023, dan sebanyak 345.980 di tahun 2024. Walaupun pada tahun 2023 mengalami penurunan, namun angka tersebut tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Bertambahnya pelaku UMKM dari tahun ke tahun menjadi fokus Pemerintah Yogyakarta agar UMKM terus berkembang dengan baik. Berdasarkan penelitian (Beni & Indah, 2019) hanya 48% pelaku UMKM yang sudah melakukan pencatatan keuangan. Pemerintah kota berusaha melakukan pendampingan guna mendorong produktivitas UMKM. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya dengan melakukan pembinaan di setiap wilayah yang berada di Yogyakarta. Berdasarkan banyaknya jumlah pelaku UMKM di setiap wilayah Yogyakarta, pemerintah terus mengupayakan pelatihan kepada UMKM. Hal tersebut dilakukan supaya usaha yang berada di Yogyakarta dapat bertahan dan terus berkembang.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup tinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengklaim bila jumlah UMKM di Bantul terbanyak dibanding kabupaten /kota di DIY (Riyadi, 2025). Keberadaan UMKM yang melimpah ini menjadikan Bantul sebagai lokasi yang representatif untuk meneliti implementasi SAK EMKM. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul jumlah UMKM di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 sebanyak 93.846. Sebagai sarana pengembangan UMKM, satu hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku usaha yaitu pembuatan laporan keuangan atas pencatatan yang telah dilakukan (Desrir, et al., 2024). Pencatatan keuangan adalah mencatat segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu usaha yang mencakup pemasukan, pengeluaran, dan aset. Dewan Standar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DSN IAI) pada tahun 2009 menerbitkan standar akuntansi untuk memudahkan pencatatan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Perbedaan dengan SAK umum yaitu lebih sederhana, namun masih banyak yang menganggap SAK ETAP ini rumit dan sulit dipahami. Hal tersebut membuat DSN IAI pada tahun 2016 menerbitkan standar baru yang lebih sederhana dan memudahkan para pelaku UMKM dengan hanya menyusun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Walaupun sudah dibuat sesederhana mungkin namun masih banyak pelaku UMKM yang belum menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Beberapa tahun terakhir, sektor UMKM di Kabupaten Bantul mengalami pertumbuhan pesat terutama pada sektor kuliner, kriya, dan pariwisata. Pelaku UMKM masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Fenomena ini diperkuat oleh penelitian (Ayem & Hanun, 2025) yang menunjukkan bahwa meskipun UMKM di Kabupaten Bantul mulai mengenal digitalisasi dan insentif fiskal, efektivitas penerapan

SAK EMKM sangat tergantung pada kualitas SDM pelaku usaha. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Alfian & Sulistiyowati, 2023) di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, juga menemukan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Selain itu, sosialisasi dari instansi terkait mengenai SAK EMKM masih belum merata dan cenderung bersifat formalitas, sehingga pelaku UMKM belum memahami secara utuh pentingnya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar. Laporan keuangan yang baik menjadi syarat utama dalam memperoleh akses pembiayaan, mengikuti program bantuan pemerintah, dan menjaga kelangsungan bisnis secara profesional.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi penerapan SAK EMKM pada UMKM adalah kualitas SDM. Kualitas SDM mencerminkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki individu dalam mengelola dan menjalankan aktivitas usaha termasuk dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Tingkat kualitas SDM memiliki dampak besar terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam konteks penerapan SAK EMKM, kompetensi dan pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi sangat menentukan sejauh mana standar tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Individu dengan kualitas SDM yang tinggi cenderung lebih mudah menerima dan menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan (Noviasari & Kurniawati, 2024). Sebaliknya, rendahnya kualitas SDM dapat menjadi hambatan dalam penerapan SAK EMKM secara efektif, karena kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis dalam akuntansi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Krisnayanti & Masdiantini (2025), Rahmayani & Werastuti (2024), dan Juniawati & Efriyenti (2023) bahwa kualitas SDM memiliki dampak positif terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Sejak diberlakukannya SAK EMKM, berbagai pihak menyampaikan persepsi terkait efektivitas, efisiensi, kemudahan, dan kegunaan standar ini

bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang menyusun laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Manfaat yang dirasakan oleh pelaku UMKM antara lain mempermudah pengusaha dalam mengembangkan usaha melalui pinjaman dari pihak lain (seperti bank), karena memiliki catatan keuangan yang jelas. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk memahami laba yang didapatkan, situasi keuangan, perubahan modal pemilik, dan arus kas usaha karena keuangan usaha terpisah dari harta pribadi. Meskipun pencatatan keuangan memberikan banyak manfaat, persepsi pelaku UMKM sering kali bervariasi. Banyak yang melihatnya sebagai kegiatan yang rumit dan memakan waktu, sehingga kurang mementingkannya (Febriyanto, 2019). Penelitian yang dilakukan Zerlina, Silfi, & Hariyani (2023) bahwa persepsi pelaku UMKM memiliki dampak positif terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, membuktikan bahwa semakin tinggi persepsi pelaku UMKM maka akan membuat pelaku usaha mengetahui pentingnya pencatatan dan pembukuan sehingga pelaku usaha dapat menerapkan pada usahanya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sinta & Budiantara (2023) dan Juniawati & Efriyenti (2023) juga menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi pelaku UMKM dan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Keengganan pelaku usaha untuk melakukan pembukuan disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan dasar di bidang akuntansi, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami proses akuntansi serta kompleksitas dalam menyusun laporan keuangan. Akibatnya, banyak dari mereka yang enggan melakukan pencatatan keuangan karena menganggapnya terlalu sulit dan membingungkan (Rajagukguk, 2024). Tingkat pendidikan SDM di UMKM cenderung rendah karena sebagian besar pekerja yang dipekerjakan memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA, dan hanya sedikit yang berasal dari jurusan akuntansi. Tingkat pendidikan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, dikarenakan pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan rendah tidak akan mengerti bagaimana cara melakukan sebuah bisnis, tentu juga akan sulit untuk

mengungkapkan informasi keuangan. Sedangkan pemahaman akuntansi sangat diperlukan untuk memproses pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Karena semakin luas seseorang memahami akuntansi, maka semakin meningkat pula pemahaman dalam menyajikan laporan keuangan secara berkualitas (Kurnia & Sari, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Ismawati, Muchlis, & Jannah (2023), Mutiari & Yudiantara (2021) dan Zerlina, Silfi, dan Hariyani (2023) menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan memiliki dampak positif terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Sebagian besar SDM tersebut belum banyak yang menerima pelatihan khusus dalam penyusunan laporan keuangan (Sandora, 2023). Pelatihan bisa dilakukan melalui keikutsertaan pelaku dalam kegiatan sosialisasi yang membahas keuangan dalam menjalankan usaha. Sosialisasi dapat diikuti di beberapa daerah karena Pemerintah Kota Yogyakarta kerap melakukan sosialisasi tersebut dengan target para pelaku UMKM. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan kemampuan para pelaku UMKM dapat semakin meningkat sehingga mereka mampu memahami dan menyusun laporan keuangan yang berhubungan dengan usaha yang dilakukan (Risal, Febriati, & Renny, 2020). Keikutsertaan sosialisasi oleh pelaku UMKM diharapkan dapat memberi sedikit gambaran akan pencatatan yang harus dilakukan selama menjalankan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Ismawati, Muchlis & Jannah (2023) dan Juniawati & Efriyanti (2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi dan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Pelaku UMKM yang kurang atau bahkan tidak mengetahui tentang pembuatan laporan keuangan sehingga mereka tidak memahami tentang pentingnya pencatatan dan pembukuan dilakukan guna keberlanjutan usaha yang dilakukan. Pembuatan laporan penting dibuat guna memantau usaha yang dijalankan. Pelaku UMKM dapat menggunakan laporan keuangan tersebut untuk memantau perkembangan usaha, menghitung pajak, serta mengambil

keputusan. Sebagian besar UMKM hanya mencatat jumlah penerimaan dan pengeluaran, barang yang masuk dan keluar, serta piutang dan utang. Namun, pencatatan tersebut umumnya hanya bersifat pengingat dan menggunakan format yang sederhana tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku (Abdallah & Maryanto, 2020).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan UMKM, namun sebagian besar hanya mengkaji satu atau dua variabel secara parsial seperti tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, atau sosialisasi SAK EMKM. Penelitian (Alfian & Sulistiyowati, 2023) di Kecamatan Banguntapan, Bantul, hanya meneliti pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, tanpa mempertimbangkan peran persepsi pelaku UMKM maupun kualitas SDM. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Novianti & Putra, 2024) lebih menekankan pada moderasi kualitas SDM dalam hubungan antara digitalisasi dan kinerja UMKM, bukan pada aspek penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Sekain itu, penelitian (Yanti & Masdiantini, 2025) memang mengkaji pengaruh kualitas SDM dan sosialisasi terhadap laporan keuangan, tetapi konteks geografisnya di luar Bantul dan tidak menyertakan persepsi serta latar belakang pendidikan pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut masih terdapat kesenjangan penelitian yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif yang meneliti pengaruh kualitas SDM, persepsi pelaku UMKM, tingkat pendidikan, dan sosialisasi terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, khususnya di konteks lokal seperti Kabupaten Bantul yang memiliki karakteristik UMKM tersendiri.

Berkaitan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang merupakan teori tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh persepsinya. Perilaku individu saat bertindak berkaitan erat dengan minat yang dimilikinya terhadap tindakan tersebut. (Susi, 2020). Menurut *Theory of Planned Behavior* pelaku usaha UMKM yang paham terkait akuntansi dengan baik dan juga

memiliki persepsi yang baik akan memberikan dampak yang membuat usaha semakin maju dan kemudahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan yang ada. Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul **“Pengaruh Kualitas SDM, Persepsi Pelaku UMKM, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas SDM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul?
2. Apakah persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul?
4. Apakah sosialisasi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui apakah kualitas SDM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui apakah persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul.

3. Mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul
4. Mengetahui apakah sosialisasi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a) Bagi Pelaku UMKM

Memberikan wawasan dan dorongan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pemahaman terhadap pentingnya pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

b) Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Menjadi masukan dalam perumusan kebijakan, program sosialisasi, dan pelatihan akuntansi yang lebih tepat sasaran untuk UMKM.

c) Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum atau pelatihan akuntansi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha kecil dan menengah.

2. Manfaat Teoritis

a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM.

b) Menambah referensi dan literatur akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi oleh UMKM.

c) Memberikan pemahaman secara teoritis mengenai hubungan antara kualitas sumber daya manusia, sosialisasi dan persepsi pelaku UMKM dengan kepatuhan terhadap penyusunan laporan keuangan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Bantul. Penelitian ini hanya berfokus pada empat faktor yaitu kualitas SDM, persepsi pelaku UMKM, tingkat pendidikan, dan sosialisasi tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mungkin juga dapat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA